

JURNAL

UPAYA PEMERINTAH TURKI DALAM MENGATASI GERAKAN SEPARATISME SUKU KURDI TAHUN 1984-2007 ¹ (THE EFFORTS BY TURKISH GOVERNMENT TO FIGHT FOR KURDS SEPARATISM IN 1984-2007) ¹

Oleh :

Andina Sari Handayani²

Saiful Bachri³

email : andin_4friends@yahoo.com

ABSTRACK

This study aimed to describe: (1) Background ethnic Kurdish separatist movement in the country of Turkey; (2) Ethnic Kurdish separatist movements in the country of Turkey; and (3) The Impact and the Turkish government's efforts in addressing the tribal Kurdish separatist movement. This study uses historical method with heuristic measures, criticism, interpretation, and historiography. The data collection technique is the technique of literature by using the system catalogs or computers and resume use of the Internet. The data analysis technique used is the historical analysis technique with external and internal criticism. The conclusions of this study are as follows. First, the Kurdish separatist movement in Turkey for autonomy began March 21, 1984, when the ban celebrations Nevros (Kurdish new year celebration). Second, the Kurdish separatist movement in Turkey gathered in the PKK. Third, the Turkish government policy on reducing negative sanctions against the PKK in the field of socio-cultural, economic, and law can not resolve the conflict between the government and ethnic Kurds.

Key words: *otonomy, Kurdi, separatist, ethnic, policy, Nevros*

¹ Artikel studi pustaka hasil ringkasan skripsi.

² Penulis adalah mahasiswa Program Studi Pendidikan Sejarah, FKIP UNS, Surakarta.

³ Dosen dan Pembimbing pada Program Studi Pendidikan Sejarah, FKIP UNS, Surakarta.

PENDAHULUAN

Turki pada masa Kemal Pasha mengalami perubahan radikal, bahkan dengan revolusioner dari orde lama ke orde baru. Kemal dengan negara barunya memperlihatkan kecenderungan yang sangat berbeda. Ia menegaskan bahwa Turki sebagai republik baru harus memperjuangkan cita-cita demokrasi seperti barat. Dari sinilah awal konflik dimulai antara Suku Kurdi dengan pemerintah Turki. Sejak tahun 1984 hingga saat ini, pemerintah Turki masih belum bisa mengatasi aksi para separatisme Kurdi yang telah banyak memakan korban baik dari Turki sendiri maupun kaum Kurdi. Etnis Kurdi di Turki menginginkan perubahan terhadap nasib mereka kemudian menuntut hak-hak yang semestinya mereka terima, baik hak secara etnis minoritas maupun dalam skala yang lebih luas yakni sebagai bangsa. Pemerintah Turki menganggap tuntutan tersebut sebagai ancaman terhadap wilayah kedaulatan negara dan harus segera ditindaklanjuti.

Di sisi lain, republik Turki, sejak berdirinya telah menetapkan perdamaian sebagai pilar utama di negaranya. Damai secara realistis dan konsisten yang dipandu oleh prinsip "*Peace at Home and Peace Abroad*" (damai di rumah dan perdamaian di dunia internasional) ditetapkan oleh Mustafa Kemal Pasha Atatürk. Turki melaksanakan kebijakan luar negeri yang merupakan generator keamanan dan stabilitas di kawasan dan sekitarnya berdasarkan sekuler demokratis dan sistem politik, ekonomi hidup dan mendamaikan tradisi modernitas dengan identitas budaya.

Konflik tersebut tidak hanya menjadi masalah di tingkat nasional tetapi juga di tingkat regional dan internasional. Dampak yang ditimbulkan di tingkat regional adalah menegangnya hubungan antara Turki dan Irak akibat operasi militer lintas batas yang dilakukan Turki ke wilayah Irak bagian utara pada akhir tahun 2006 dan pada tanggal 17 Oktober 2007 disahkannya undang-undang yang mengizinkan angkatan bersenjata Turki untuk melakukan serangan lintas batas guna melumpuhkan serangkaian pemberontakan yang dilakukan oleh para separatisme kurdi yang terkenal sebagai Partiya Kankerran Kurdistan (PKK). Sementara itu,

dampak yang ditimbulkan di tingkat internasional adalah melonjaknya harga minyak dunia yang diakibatkan operasi militer oleh pemerintah Turki ke wilayah Irak utara.

KAJIAN TEORI

1. Perjuangan

Sukarno (1984), mengartikan perjuangan dalam arti luas yaitu membangun materiil dan moril agar mencapai kehidupan yang lebih baik. Selanjutnya dikemukakan tentang perjuangan individu yaitu perjuangan mempergunakan atau mengalahkan keadaan agar eksistensinya (luar dalam) tumbuh dan berkembang. Dari pengertian ini, perjuangan oleh Sukarno diartikan sebagai membangun. Sarana dan prasarana adalah mempergunakan keadaan agar eksistensinya tetap subur dan berkembang (hlm.9). Dari pengertian tentang perjuangan di atas, dapat disimpulkan bahwa perjuangan adalah suatu usaha atau ikhtiar yang dilakukan individu maupun kelompok untuk mencapai suatu maksud dan tujuan yang diharapkan. Perjuangan yang dilakukan oleh suku kurdi berjuang untuk memperoleh hak-haknya yang dibatasi oleh pemerintah Turki serta mempertahankan identitas dan sistem budaya suku Kurdi.

2. Suku Kurdi

Suku Kurdi merupakan suatu kelompok etnis di Turki selain etnis Arab dan etnis minoritas Turkoman serta Assirya. Suku Kurdi adalah suatu kelompok etnis Indo-Eropa (*Indo European tribes*) yang mayoritas menganut agama Islam Sunni dan tinggal di Wilayah Turki bagian Utara. Wilayah orang-orang Kurdi meliputi beberapa Negara seperti Iran, Irak, dan Suriah. Suku Kurdi berasal dari bangsa Medes yang masuk ke Parsi dari tahun 614 sampai 550 sebelum Masehi. Suku Kurdi sebagai kelompok etnis memiliki bahasa sendiri yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari yakni Kurmanji dan Sorani/kurdi. Suku Kurdi merupakan etnis yang relatif tua, tetapi kesadaran terhadap wilayah sebagai tempat mereka tinggal baru muncul belakangan dan terlambat sebagai konsekuensi atas kultur tradisional nomaden, yang hidup berpindah-pindah sambil ternak dan bertani. Pasca Perang Dunia I, ketika Negara-negara mulai menetapkan garis perbatasan, barulah kesadaran wilayah suku Kurdi muncul, terutama karena terdesak dan terpaksa

meninggalkan pola hidup tradisionalnya, serta mulai hidup menetap (Sihbudi. R, 1991).

3. Konflik

Konflik yang terjadi antara suku Kurdi dengan Pemerintah Turki disebabkan adanya perbedaan kepentingan antara kedua belah pihak yang menyangkut masalah politik, ekonomi dan budaya. Secara politik, suku Kurdi menuntut pemberian status otonomi di wilayah Kurdistan di Turki bagian tenggara kepada Pemerintah Turki, tetapi tuntutan tersebut tidak dipenuhi oleh Pemerintah Turki dengan alasan menjaga keutuhan bangsa. Secara ekonomi, wilayah kurdi di Turki bagian tenggara yang merupakan penghasil minyak dan gas terbesar yang berada diantara perbatasan Irak Mosul dan Kirkuk. Serta dikhawatirkan keinginan suku Kurdi yang ingin mendirikan sebuah Negara otonom Kurdistan mengganggu stabilitas pemerintahan Turki. Dalam bidang budaya suku kurdi dilarang menggunakan bahasa kurdi, dan dilarang menggunakan identitas yang menunjukkan kesukuannya, dengan sebab tersebut diatas maka timbullah rasa kekecewaan yang dalam terhadap pemerintah Turki dan puncak kekecewaan tersebut bterjadi pada tahun 1984 dengan dilarangnya suku kurdi merayakan tahun baru kurdi.

4. Separatisme

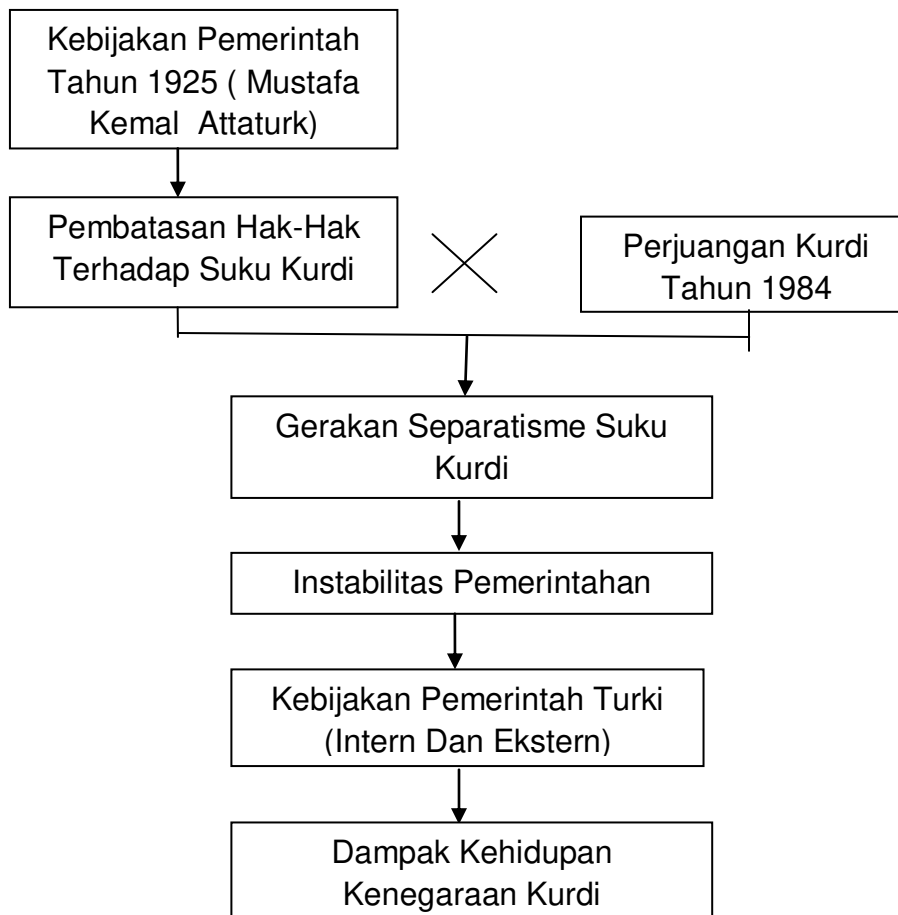
Gerakan Separatisme menurut Julius Pour dalam bukunya "*Dari Mengusir Kempeitai Sampai Menumpas RMS*" memaparkan bahwa: Gerakan Separatis adalah suatu gerakan untuk mendapatkan kedaulatan dan memisahkan suatu wilayah atau kelompok manusia, Gerakan separatis biasanya berbasis nasionalisme atau kekuatan religious (Julius Pour, 2008 : 3). Konflik antara suku Kurdi dengan pemerintah Turki ini dapat dikatakan sebagai sebuah gerakan separatisme. Suku Kurdi menginginkan sebuah otonomi penuh terhadap wilayah Kurdi di Turki sebagai daerah otonom Kurdistan.

5. Kebijakan

Secara harifah ilmu kebijakan adalah terjemahan langsung dari kata *policy science* (Dror, 1968: 6-8). Beberapa penulis besar dalam ilmu ini, seperti William Dunn, Charles Jones, Lee Friedman, dan lain-lain, menggunakan istilah *publik policy*

dan *publik policy analysis* dalam pengertian yang tidak berbeda. Istilah kebijaksanaan atau kebijakan yang diterjemahkan dari kata *policy* memang biasanya dikaitkan dengan keputusan pemerintah karena pemerintahlah yang mempunyai wewenang atau kekuasaan untuk mengarahkan masyarakat, dan bertanggung jawab melayani kepentingan umum. Turki merupakan Negara yang paling radikal dalam menentang upaya pembentukan Negara Kurdistan dibandingkan Negara-negara lain. Pemerintah Turki sangat aktif dalam upaya menghapus identitas etnis Kurdi. Hal tersebut dapat dilihat dari kebijakan represif yang diterapkan oleh pemerintah Turki untuk melarang penggunaan bahasa Kurdi dan adat lainnya. Kebijakan tersebut tercantum dalam Konstitusi Tahun 1924 Bab III Pasal 42. Pada masa pemerintahan Presiden Tugrut Ozal juga diterapkan kebijakan yang melegalkan penggunaan bahasa Kurdi secara terbatas.

KERANGKA BERPIKIR



Keterangan:

Sejak tahun 1925 Turki di bawah pimpinan Mustafa Kemal Atatürk setelah kejatuhan Khilafah Ottoman, Turki telah mulai menata pemerintahannya dan politik luar negerinya dengan bergabung dengan Barat dan menjalin hubungan dengan dunia Timur. Republik Turki, sejak berdirinya telah menetapkan perdamaian sebagai pilar utama di negaranya. Damai secara realistis dan konsisten yang dipandu oleh prinsip "*Peace at Home and Peace Abroad*" (damai di rumah dan perdamaian di dunia internasional)" ditetapkan oleh Mustafa Kemal Atatürk. Turki melaksanakan kebijakan luar negeri yang merupakan generator keamanan dan stabilitas di kawasan dan sekitarnya berdasarkan sekuler demokratis dan sistem politik, ekonomi hidup dan mendamaikan tradisi modernitas dengan identitas budaya. Turki ingin membantu mengamankan dan memelihara perdamaian, kemakmuran, stabilitas dan kerjasama lingkungan yang kondusif bagi pembangunan manusia di dalam negeri dan dunia internasional. Namun, cita-cita Turki tidak selamanya mulus.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian dengan teknik studi pustaka sehingga tidak terikat oleh tempat tertentu. Waktu pelaksanaan penelitian berlangsung selama 6 bulan yaitu dari bulan Juli 2012 - Desember 2012.

Penelitian ini berupa penelitian sejarah dengan dua sumber data yaitu sumber data primer yang berupa arsip dan artikel-artikel dari media massa, sedangkan sumber sekundernya adalah buku dan sumber lain yang relevan dengan penelitian. Data dikumpulkan dengan menggunakan bermacam-macam materi yang terdapat dalam buku, majalah, dokumen, dan surat kabar dan dianalisis dengan teknik analisis historis. Adapun tahap-tahap analisis historis yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi.

PEMBAHASAN

Latar Belakang Gerakan Separatisme Suku Kurdi

Sejarah Suku Kurdi berasal dari rumpun bangsa Indo-Eropa yang dikenal sebagai *sulu* yang mendiami daerah pegunungan Turki, Irak, Iran, dan Suriah sejak 8000 tahun yang lalu. Menurut Profesor Mehrdad R Izady, seorang pakar Kurdi di Universitas Harvard, sejarah suku Kurdi dibagi menjadi empat periode. Periode pertama (6000 SM sampai 5400 SM) disebut periode Halaf. Ini berdasarkan bukti-bukti arkeologi, seperti bentuk dan lukisan pada pot-pot kuno yang ditemukan di gunung Tell Halaf yang terletak di sebelah barat Qamishli (Suriah) (<http://swaramuslim.com/islam/more>).

Periode kedua (5300 SM – 4300 SM) disebut periode al-Ubaid, nama sebuah gunung di utara Irak Utara tempat ditemukannya banyak peninggalan kuno. Penduduk Ubaid inilah yang kemudian memberikan nama “Tigris” dan “Euphrates” untuk dua sungai utama di Irak yang mengalir dari Kurdistan ke Mesopotamia dan meneruskan suku Chaldean atau Khaldi.

Periode ketiga disebut zaman Hurri, dengan pusat kehidupan pindah ke kawasan pegunungan Zogros-Taurus-Pontun dengan beberapa kerajaan kecil, antara lain Arrap’ha, Melidi, Washukani dan Aratta. Sekitar 2000 SM suku Hitti dan Mittani (Sindi) datang dan menetap di Kurdistan. Tahun 1200 SM bangsa Arya (Indo-Eropa) melakukan invasi besar-besaran termasuk ke Kurdistan, sehingga pada tahun 727 SM kerajaan Hurri berakhir. Selanjutnya, muncul kerajaan Medes dengan ibu kota di Ecbatana (sekarang Hamadan Iran) yang bertahan hingga tahun 549 SM. Kaun Medes inilah yang diakui oleh orang-orang Kurdi sekarang ini sebagai nenek moyang mereka.

Periode keempat disebut periode Simitik dan Turkik, menyusul interaksi orang-orang Medes dengan orang-orang Yahudi, Nasrani dan Islam (Arab) serta asimilasi orang mereka dengan bangsa Turki. Terbukti dengan adanya nama-nama kabilah seperti Karachul, Oghaz, Devalu, Karaqich, Iva dan sebagainya.

Suku Kurdi mencita-citakan negara Kurdistan yang merdeka dan demokratis. Suku Kurdi yang terbesar di Turki, Iran, Irak, dan Suriah sebagai minoritas etnis sering diabaikan oleh pemerintah masing-masing negara tersebut.

Akibatnya, suku Kurdi ingin memisahkan diri dari negara induk masing-masing dan bercita-cita mendirikan negara Kurdistan.

Rahman (2003), menjelaskan Perjanjian Sevres (*Treaty of Sevres*) tahun 1920 di Perancis oleh pihak Sekutu sebagai pihak yang menang dalam Perang Dunia I dengan Dinasti Ustmaniah Turki memberikan keuntungan bagi perjuangan Suku Kurdi. Dalam perjanjian tersebut ditetapkan pembentukan wilayah Kurdistan merdeka yang sebelumnya berada di bawah kekuasaan Dinasti Ustmaniah Turki, tetapi kenyataannya keputusan tersebut tidak terealisasi. Turki tidak mau menjalankan ketentuan mengenai Suku Kurdi, bahkan Mustafa Kemal Attaturk memaksa sekutu untuk membatalkan Perjanjian Sevres yang merugikan dan melemahkan Turki karena perbatasan timur Negara Turki memanjang hingga Sulaymaniah, Arbil, Kirkuk, dan Mosul berada di utara wilayah Irak sekarang. (hlm. 196).

M. Riza, Sihbudi (1991) menjelaskan bahwa fakta wilayah Kurdistan di beberapa Negara menjadi kendala utama terwujudnya negara Kurdistan merdeka. Jika dipaksakan sangatlah sulit karena suku Kurdi harus menghadapi empat negara sekaligus yakni Turki, Iran, Irak dan Suriah. Berdasarkan kenyataan tersebut, suku Kurdi tetap mencita-citakan berdirinya sebuah negara Kurdistan untuk mendapatkan suatu wilayah yang otonom sehingga suku Kurdi dapat mengatur diri dan mempertahankan identitas serta sistem budaya mereka.

Pemberontakan etnis Kurdi pertama kali muncul pada Februari 1925 dipimpin oleh Syeikh Said, namun pemberontakan ini tidak bertahan lama karena rezim Mustafa Kemal Attaturk pada saat itu cukup sigap dengan segera mengerahkan angkatan bersenjata untuk menumpas pemberontakan tersebut. Pada tahun 1929 pemberontakan kembali terjadi namun dengan tingkat kekerasan yang lebih kecil dibandingkan sebelumnya sehingga dengan mudah dapat segera ditangani oleh pemerintah Turki. Pasca pemberontakan kedua ini, sejumlah pimpinan Kurdi yang tertangkap diasingkan ke daerah-daerah pedalaman di wilayah timur. Pengawasan secara ketat segera dilakukan atas daerah tersebut dan kawasan tersebut kemudian dinyatakan tertutup bagi pengunjung asing. Isolasi ini

bertujuan untuk mencegah timbulnya kembali pemberontakan etnis Kurdi yang mengancam proyek modernisasi dan sekularisasi Attaturk atas Turki.

Pada tahun 1912 sejumlah mahasiswa Kurdi di Istanbul membentuk *Hevi* (Harapan), sebuah perkumpulan dengan tendensi yang lebih nasionalis. Pada masa perang kemerdekaan terdapat sebuah gerakan perlawanan rakyat Kurdi yang menentang kaum nasionalis di Dersim (sekarang menjadi Tunceli), yang dipimpin oleh kepala suku yang menuntut otonomi, namun dapat ditumpas dengan mudah. Pada umumnya rakyat Kurdi mendukung perlawanan itu, meskipun ada upaya-upaya para agen Inggris untuk mempengaruhi mereka dan meskipun terdapat fakta bahwa mereka diberi otonomi dibawah Perjanjian Sevres.

Hubungan antara rakyat Kurdi dan pemerintah Republik yang didominasi oleh orang Turki memburuk pada tahun 1924. Penghapusan kekhalifahan menghapuskan simbol religious penting yang menyatukan dua komunitas tersebut. Pada waktu yang sama, republik nasionalis, dalam usahanya merekonstruksi kesadaran nasional yang baru mengembangkan kebijakan represif terhadap terhadap identitas kurdi tersebut, kebijakan tersebut antara lain adalah pemakaian dan pengajaran bahasa Kurdi secara umum dilarang, para pemilik tanah dan para kepala suku Kurdi yang berpengaruh dipaksa bermukim di bagian barat negeri itu (Erik, J. Zurcher, 2003).

Tanda pertama perlawanan dari suku Kurdi terhadap kebijakan-kebijakan tersebut adalah sebuah pemberontakan abortif yang dilancarkan oleh garnisium di Beytusebap di sebelah tenggara pada bulan Agustus 1924. Pemberontakan besar juga dirancang oleh *Azadi* dan Sheikh Said untuk dilancarkan bulan Mei 1925. Peristiwa ini ternyata meletus lebih cepat dari perkiraan dan para pemberontak Kurdi kini secara cepat dapat didesak kembali ke pegunungan. Penangkapan Sheikh Said pada tanggal 27 April betul-betul menandai berakhirnya pemberontakan tersebut. Sekalipun kelompok-kelompok kecil gerilyawan masih melanjutkan perang gerilya disepanjang musim panas.

Pada tahun 1926, pemberontakan Kurdi kembali meletus di Lereng Gunung Ararat, yang memakan waktu empat tahun dan dapat dipandang sebagai kelanjutan langsung dari pemberontakan Sheikh Said, namun pemberontakan ini

tidak begitu meluas. Pasca pemberontakan itu pemerintah melalui para pejabat militer dan pengadilan-pengadilan kemerdekaan memperlakukan orang-orang Kurdi secara sangat kejam. Banyak dari para pemimpin mereka yang dihukum mati dan sejumlah besar orang Kurdi, yang berjumlah lebih dari 20.000 orang, dideportasi dari tenggara dan dipaksa untuk tinggal dibagian barat negara Turki. Sejak saat itu eksistensi identitas Kurdi yang tersendiri secara resmi ditolak. Undang-undang Pemeliharaan Ketertiban bukan hanya digunakan untuk menumpas rakyat Kurdi. Delapan dari beberapa surat kabar dan terbitan berkala yang trepenting (konservatif, liberal, bahkan Marxis) di Istanbul ditutup, sebagaimana halnya surat kabar di profinsi, dengan demikian hanya tersisa organisasi milik pemerintah Turki saja yaitu *Hakimiyet-I Milliye* (Kedutaan Nasional) di Ankara dan *Cumhuriyet* di Istanbul sebagai satu-satunya surat kabar nasional.

Pada awal periode Republik Turki tahun 1926, di bawah pemerintahan Mustafa Kemal Attaturk, penggunaan bahasa Kurdi dilarang di depan publik. Pemerintah Turki melarang penyampaian pendidikan dan penyebaran informasi baik dalam bentuk media cetak maupun media elektronik dalam bahasa Kurdi. Tujuan pelarangan bahasa Kurdi ini adalah untuk menasionalisasikan suku Kurdi menjadi warga Negara atau bangsa Turki tanpa ada unsur-unsur etnis yang melekat pada setiap suku di Turki. Pelarangan memakai bahasa Kurdi ini sejak dideklarasikannya Republik Turki pada tahun 1924 istilah kewarganegaraan harus disesuaikan dengan istilah ke-Turki-an, etnis Kurdi dan etnis lainnya yang dapat dikatakan sebagai warga Negara Turki apabila mereka meninggalkan identitas keetnisannya. Penekanan dan pengekangan terhadap identitas Kurdi inilah yang mengakibatkan munculnya konflik antara pemerintah dan etnis Kurdi. (Ully Nuzulian, 2009).

Tahun 1984, PKK mengubah dirinya menjadi sebuah organisasi paramiliter, yang berbasis diwilayah Iran, Irak, dan Syria. Pada tahun yang sama, serangan konvensional pertama segera dilancarkan terhadap target-target milik pemerintah di Provinsi Anatolia, wilayah tenggara Turki. Jika sebelumnya serangan-serangan terhadap kepentingan pemerintah pusat dilakukan secara sporadik dan tak terorganisir dengan baik, maka pada periode ini perlawanan bersenjata PKK

dilaksanakan secara pasif, kontinyu, dan terorganisir (<http://www.globalsecurity.org>).

Gerakan Separatisme Suku Kurdi Di Negara Turki Tahun 1984-2007

Pada tanggal 27 Oktober 1987, Abdullah Ocalan, seorang mahasiswa Ilmu Politik di Universitas Ankara, bersama beberapa orang rekannya memproklamkan berdirinya Partiya Karkeran Kurdistan (Partai Pekerja Kurdistan/PKK). Organisasi ini menganut ideologi Marxisme-Leninisme dan nasionalisme Kurdi serta bercita-cita mendirikan Negara Kurdi di wilayah Turki bagian Tenggara. Sejak saat itu PKK mulai melancarkan serangan-serangan bersenjata terhadap target-target milik pemerintah Turki, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dengan terbentuknya PKK inilah, tuntutan kemerdekaan etnis Kurdi terhadap pemerintah Turki semakin mengemuka dan menguat, sehingga pada akhirnya mendorong tindakan yang kian represif dari pihak pemerintah Turki terhadap etnis Kurdi. (George, Lenezowski, 1992).

Aktivitas-aktivitas PKK tidak terkendali dalam menteror para penjaga desa, merampas desa-desa, dan membantai penduduk sipil. Semua kegiatan ekonomi politik, kemiliteran, organisasi-organisasi social dan budaya yang ada menjadi medan perang. PKK juga telah berjanji akan menyalpkan parati-partai politik, institusi-institusi pendidikan dan kebudayaan "imperialis", badan represntatif dan legislatif, dan semua kerjasama daerah dan badan-badan yang bekerjasama dengan pemerintah pusat wilayah Kurdistan (Erik J. Zurcher, 2003).

Pada tahun 1989, PKK membentuk aliansi dengan sejumlah kelompok gerilya sayap kiri yang ekstrim di kota, seperti *Dev Sol*, TIKKO, THKP-C dan lain-lain dengan tujuan meningkatkan kemampuan untuk bergerak di kota-kota besar Turki. PKK juga bisa menarik dukungan masyarakat lokal yang secara konsisten turut bergerilya dengan PKK (hlm. 415). Aktivitas para gerilyawan PKK ini mengakibatkan angkatan bersenjata Turki dihadapkan pada situasi perang gerilyawan klasik. PKK juga mendapat dukungan dari sebagian besar penduduk lokal yang ikut bergerilya. Kemarahan angkatan bersenjata Turki kemudian diarahkan kepada warga sipil lokal (Erik, J. Zurcher, 2003).

Bentrokan antara pasukan keamanan Turki dengan PKK telah memakan Korban yang tidak sedikit. Hingga tahun 1991 diperkirakan terdapat sekitar 3.568 korban jiwa, yang terdiri dari 1.278 warga sipil, 1444 militan PKK dan 846 pasukan keamanan Turki. Selain mempergunakan serangan-serangan yang bersifat konvensional, dalam kurun waktu 1996-1999 PKK menggunakan metode serangan bom bunuh diri (*suicide bombing*) (Kemal Kirisci dan Gareth M. Winrow, 1997). Konflik antara Kurdi dengan angkatan bersenjata Turki, dalam kurun waktu antara 1984 hingga 1996 korban tewas sudah mencapai 17.000 orang. Upaya pemerintah Turki dalam memutuskan pasokan dan rute infiltrasi PKK, pertempuran dilaksanakan secara regular hingga ke perbatasan Irak. Pesawat-pesawat Turki membordir kamp-kamp PKK di Irak Utara. (Erik, J. Zurcher.2003: 416). Kelompok gerilyawan Kurdi tercatat beberapa kali melakukan serangan bom di kota-kota wisata Aegean. Diantaranya, serangan bom di resor Cesme pada 11 Juli, di Pantai Aegean, yang melukai sedikitnya 20 orang, sedangkan tanggal 30 April sebuah bom juga meledak di sebuah alat pemutar kaset, menewaskan seorang polisi dan empat warga di Kusadasi. Gerilyawan separatis Kurdi telah mengancam akan terus melakukan serangan di sector pariwisata Turki, yang sangat vital bagi perekonomian Turki (Kompas, 17 Juli 2005).

Kelompok gerilyawan PKK ini juga mendapatkan dukungan dari suku Kurdi di negara-negara tetangga seperti di Irak, Iran dan Suriah selain memberikan bantuan kelengkapan pangan, pengungsian dan juga persenjataan bagi separatis PKK. Suku Kurdi di negara-negara tersebut memiliki keinginan yang sama yaitu ingin mendirikan sebuah negara Kurdistan yang otonom (<http://www.tempointeraktif.com>). Pada tahun 1990-an Damaskus pernah mendukung PKK dan menjamin ruang perlindungan bagi PKK di kawasan Suriah. Penyebabnya, pada waktu itu Turki menjalin hubungan baik dengan Israel. Pada masa-masa Perang Dingin, Israel dan Turki dipandang sebagai pro Barat, sementara Suriah cenderung berorientasi kepada kepentingan Uni Soviet. Bahkan Rusia maupun Iran bersimpati besar pada Partai Pekerja Kurdi (PKK) yang sempat melakukan pemberontakan di Turki Tenggara melalui PKK, keduanya dapat

menyerang Turki dan menjatuhkan posisi Turki dalam Uni-Eropa (Bona Ventura, 2008).

Dampak dan Upaya Pemerintah Turki Dalam Mengatasi Gerakan Separatisme Suku Kurdi

Dampak Gerakan Separatisme Kurdi di Turki adalah adanya serangan kelompok gerilyawan PKK tersebut mengundang reaksi keras dari pemerintah Turki. Presiden Turki, Abdullah Gul, Perdana Menteri, Recep Tayyip Erdogan bersama dengan sejumlah menteri dan pimpinan militer menggelar pertemuan pada tanggal 21 Oktober 2007 untuk membahas tindakan tegas yang akan ditempuh menyusul terjadinya insiden penyerangan oleh para gerilyawan PKK.

Pada tanggal 15 Oktober 2007 pemerintah Turki juga telah mengajukan rancangan undang-undang kepada parlemen yang akan menjadi dasar hukum pelaksanaan operasi militer Turki ke wilayah Kurdi yang terletak di bagian Utara Irak, yang dapat dilakukan kapan saja guna menghancurkan basis-basis PKK di wilayah tersebut. Pada tanggal 17 Oktober 2007, dengan suara bulat akhirnya parlemen Turki mengesahkan rancangan Undang-undang dan memberikan izin kepada angkatan bersenjata Turki untuk melakukan serangan lintas batas guna melumpuhkan basis-basis PKK di wilayah Irak Utara (<http://www.eramuslim.com>). Gerakan pemberontak Kurdi telah dianggap sebagai gerakan separatisme yang berbahaya bagi pemerintah Turki karena gerakan tersebut mengancam kedaulatan dan keutuhan wilayah Turki. Pemberontakan Kurdi telah memasuki arena politik Turki dengan membentuk partai politik yang radikal dan mampu menghadapi tekanan Negara. Upaya pemerintah Turki dalam menangani gerakan separatis Kurdi telah dilakukan sejak awal pemberontakan yaitu tahun 1984 hingga saat ini konflik antara Turki dengan Kurdi masih terus berlangsung (Metin, Yuksel, 2009).

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Turki dalam mengatasi separatisme Kurdi dengan melakukan serangkaian upaya melalui operasi militer, terutama yang berada di wilayah Irak bagian Utara. Selain upaya penyelesaian dengan jalan militer, pemerintah Turki juga mengurangi sanksi negatif bagi etnis Kurdi yang tinggal di Turki, di antaranya adalah sebagai berikut.

Upaya Pemaksaan Fisik

Pemaksaan secara fisik adalah salah satu kebijakan intervensi yang digunakan oleh pemerintah Turki dalam upaya untuk mengatasi gerakan separatisme Kurdi. Pemaksaan secara langsung ditujukan kepada para gerilyawan PKK dengan jenis-jenis intervensi atau pemaksaan secara fisik yang dilakukan oleh pemerintah Turki antara lain adalah sebagai berikut.

Sistem Benteng Desa

Antara tahun 1984-1999, PKK dan pasukan militer Turki mulai melakukan serangkaian perang terbuka, sebagian besar desa-desa Kurdi di bagian tenggara Anatolia telah dihancurkan, dan menyebabkan penduduk sipil etnis Kurdi bergerak ke pusat pertahanan lokal seperti Diyarbakir, Van dan Sirnak, juga kota-kota di Turki Barat. Perang terbuka antara militer Turki dengan gerilyawan PKK menyebabkan pengurangan jumlah penduduk etnis Kurdi, kemiskinan di bagian Tenggara Turki, dan status operasi militer Turki.

Beberapa bulan setelah PKK melancarkan serangan pertamanya pada tahun 1984, pemerintah Turki memutuskan untuk mengorganisir dan mempersenjatai warga desa sekitar dengan tujuan untuk lebih mendekatkan mereka ke Negara dan membantu pemerintah dalam mengatasi gerakan separatisme Kurdi. Perdana Menteri Tugrut Ozal pada saat itu, membentuk sistem "Benteng Desa" diwilayah-wilayah konflik untuk mencegah agresi dari gerilyawan PKK. Pembentukan sistem benteng desa tersebut adalah keputusan awal dari pemerintah Turki ketika masalah separatisme Kurdi tumbuh menjadi permasalahan pelik dan konflik berdarah yang berkepanjangan di Turki. Tujuan dari sistem ini adalah berusaha untuk menggalang dukungan dari penduduk lokal Kurdi.

Dalam upaya untuk memutuskan pasokan dan rute infiltrasi PKK, pertempuran dilaksanakan secara regular sampai tapal batas Irak. Pesawat-pesawat tempur Turki membombardir kamp-kamp di Irak Utara. Pemerintah di Ankara juga berusaha untuk membentuk aliansi yang lebih efektif dengan gerakan Kurdi di Irak, dengan PDK Barzani dan FUK Talabani. Bulan November 1992 pasukan Turki bergabung dengan warga Kurdi di Irak untuk melancarkan serangan terhadap PKK. Untuk sementara pasukan Turki menyerbu PKK dari Irak Utara, tetapi efeknya

sangat terbatas. Hal ini terbukti dengan kenyataan bahwa pasukan Turki mengadakan serangan besar-besaran ke daerah tersebut pada Maret 1995 (dikenal sebagai “Operasi Baja”) untuk sekali lagi menyingkirkan pasukan PKK. Sebanyak 35.000 tentara dan 13 jenderal ikut andil dalam operasi ini. Setelah pasukan ini ditarik mundur maka dilakukan negosiasi dengan Barzani mengenai penciptaan zona keamanan dengan pola Israel di Lebanon Selatan, tetapi walaupun Barzani bersedia menerima uang dan senjata, dia menolak kehadiran militer Turki di daerah kekuasaannya. (Erik J. Zürcher, 2003).

Operasi Militer Besar-besaran

Pemerintah Turki mengaku akan melakukan segala cara untuk menumpas pemberontakan kaum separatisme Kurdi yang dikenal dengan PKK walaupun diketahui bahwa sangat sulit untuk menenyapkan pemberontakan ini karena para gerilyawan PKK sudah sangat terlatih di medan pertempuran. Dalam konteks ini, perbatasan Irak merupakan wilayah yang paling penting dalam setiap operasi militer Turki. Alasan inilah yang menyebabkan pemerintah Turki seringkali melakukan operasi militer hingga lintas batas ke wilayah perbatasan Irak dalam rangka menghentikan aksi pemberontak PKK.

Operasi militer yang dilakukan oleh pemerintah Turki tersebut membuktikan bahwa penyelesaian konflik dengan jalan militer hingga saat ini masih belum mendapatkan titik temu. Operasi militer Turki lintas perbatasan sampai dengan tabal batas Irak ini hingga saat ini masih terus berlangsung setelah di tandatangannya Undang-undang Operasi militer atas PKK pada Oktober 2007.

Upaya Pengurangan Sanksi Negatif

Penyelesaian masalah antara PKK dengan pemerintah Turki dengan cara sanksi militer hingga saat ini belum bisa dikatakan berhasil karena pemberontakan para separatisme Kurdi ini masih terus berlangsung hingga tuntutan mereka terpenuhi. Selain kebijakan militer yang dikeluarkan oleh pemerintah, Turki juga memberikan sanksi negatif terhadap separatis Kurdi (<http://europe.eu.int/com/enlargement>)

Keputusan Turki sebagai anggota Council of Europe menyebutkan bahwa warga Negara Turki keturunan Kurdi harus diberi kesempatan dan sumber-

sumber material untuk menggunakan dan mempertahankan bahasa aslinya dan tradisi budaya dalam kondisi yang dijamin oleh pemerintah Turki. Kebijakan pemerintah Turki dalam pengurangan sanksi negatif terhadap etnis Kurdi mencakup beberapa bidang berikut.

Bidang Sosial Budaya

Dampak dari pengurangan sanksi negatif terhadap kebudayaan etnis Kurdi tersebut adalah mulai diperbolehkannya penggunaan bahasa Kurdi di depan umum. Penerbitan buku-buku, majalah dan surat kabar berbahasa Kurdi tersebar luas. Para imigran Kurdi yang beremigrasi ke kota-kota besar di Turki barat tidak mengalami kesulitan dalam berinteraksi dengan masyarakat Turki lainnya. Pada pertengahan tahun 2002 pemerintah Turki memberikan jaminan hak kepada setiap warga Turki untuk melestarikan kebudayaan-kebudayaan lokal mereka tanpa adanya diskriminasi atas dasar jenis kelamin, asal etnis, agama dan bahasa (Kinnane. Derk, 1964).

Bidang Perekonomian

Pemerintah Turki mengeluarkan dana sebesar 222 Milyar dollar AS untuk investasi di wilayah Turki Tenggara yang merupakan wilayah mayoritas etnis Kurdi di Turki. Selain itu, pemerintah Turki juga merancang sebuah proyek yang dinamakan *Southeast Anatolian Development Proyek (GAP)*. GAP adalah proyek pemanfaatan sumber daya air sungai Eufrat dan Tigris dengan tujuan untuk kepentingan pembangunan perekonomian di wilayah tenggara (<http://www.pas.org/irp/world/>). Beberapa kebijakan dalam bidang perekonomian tersebut dilakukan oleh pemerintah Turki dengan tujuan memekmurkan wilayah tenggara Turki untuk mengurangi pemberontakan PKK.

Bidang Hukum

Untuk mengembalikan citra baik Turki dalam pandangan dunia Internasional, pada 18 November 1991 Turki mengesahkan Rancangan Undang-undang pasal 55 mengenai keringanan hukuman bagi para tahanan politik dan gerilyawan Kurdi yang berhasil ditangkap. Dalam undang-undang ini masa hukuman bagi para pelaku kejahatan lebih diperpendek. Dalam hal ini, para tahanan diberikan hak untuk bertemu secara pribadi dengan pengacara mereka dalam setiap sesi

interogasi (Kementrian Luar Negeri Turki, 1991). Selain itu, pada 22 Maret 2000 pemerintah Turki juga mengeluarkan amandemen pasal 312 konstitusi yang memungkinkan pemerintah memberikan amnesty dan membebaskan para narapidanyang divonis memperbolehkan hukuman dibawah 10 tahun.

Upaya Pemerintah Turki Dalam Bentuk Kerjasama dengan Negara-negara Lain

Dalam rangka mengatasi gangguan keamanan yang terus-menerus dilancarkan oleh para gerilyawan PKK, Turki berupaya menjalin kerjasama berupa penciptaan keamanan bersama untuk menumpas serangan PKK. Bentuk kerjasama tersebut antara lain:

Kerjasama dengan Iran

Pemerintah Turki menganggap menjalin kerjasama dengan pemerintah Iran merupakan suatu langkah penting dalam menumpas gerakan separatisme Kurdi. Permasalahan antara pemberontak Kurdi dengan pemerintah Turki juga menimbulkan kerugian bagi pemerintah Iran. Turki memutuskan untuk melancarkan kerjasama diplomatik dengan pemerintah Iran untuk sama-sama menjaga keamanan wilayah perbatasannya masing-masing dari ancaman terror pemberontakan Kurdi. Hal ini terlihat dalam beberapa perjanjian kerjasama dan pertemuan-pertemuan yang diadakan oleh kedua Negara untuk membicarakan permasalahan separatisme Kurdi (www.kapanlagi.com).

Kerjasama dengan Irak

Kerjasama diplomatik yang dilakukan oleh pemerintah Turki antara lain pada tanggal 19 Juli 2005, diadakan pertemuan menteri dalam negeri Irak dan Turki di Istanbul. Hasil yang dikeluarkan pada pertemuan tersebut menekankan, tiap Negara perlu mengadakan kerjasama memerangi terorisme termasuk pemberontak Kurdi dan PKK di dalamnya dan juga memelihara keamanan dan kestabilan kawasan. Selaian itu, pertemuan ini juga menghasilkan penekanan pada masing-masing negara untuk mengintensifkan komunikasi dan pertukaran berbagai informasi mengenai elemen teroris yang terkait, serta dapat mengendalikan dan mengontrol perbatasan untuk mencegah elemen teroris untuk membangun

pangkalannya di masing-masing wilayah negara di antaranya adalah Iran, Irak, Suriah dan Turki sendiri. (Kompas, 2005).

Kerjasama dengan Suriah

Beberapa pertemuan dan perjanjian antar pemerintah Turki dan Syria telah diadakan untuk lebih merekatkan hubungan antar kedua Negara. Pada 7 Juni 1993 diadakan pertemuan antara Turki dan Syria yang membahas masalah Kurdi di kawasan perbatasan kedua negara tersebut, khususnya dalam memantau perbatasan yang dimanfaatkan PKK sebagai lalu lintas untuk bergerilya. Hasil pertemuan dari kedua negara tersebut kemudian membuat Suriah untuk menghentikan dukungannya terhadap PKK dan masing-masing negara memonitori wilayah perbatasannya secara lebih intensif dalam membendung penyusupan gerilyawan PKK dan lebih jauh lagi Turki dan Syria menandatangani perjanjian ekstradisi bagi anggota-anggota PKK yang tertangkap di Syria. (Departemen Luar Negeri RI, Badan Penelitian dan Pengembangan Masalah Luar Negeri, Buku I tahun 1993-1994,).

Pelaksanaan hubungan diplomatik dan kerjasama keluar negeri Turki dalam rangka pemberantasan PKK difokuskan pada tetangga Turki yaitu, Irak, Iran dan Suriah karena Negara-negara tersebut menruakan Negara yang paling mendukung atas pemberontakan Kurdi bahkan hubungan antara ketiga Negara dengan Turki pernah memburuk akibat dari dukungan yang mereka berikan kepada PKK dengan alasan kemanusiaan (Uilly Nuzulian, 2009: Jurnal Vol. XV).

Dampak Gerakan Separatisme

Adanya konflik antara pemerintah Turki dan suku Kurdi ini banyak menimbulkan korban baik materi maupun nyawa manusia. Sepanjang kurun waktu 1984 hingga 2007 sudah tercatat sekitar 40.000 jiwa melayang baik pada pemerintah Turki atau Kurdi.

Negara otonom Kurdistan sulit didirikan karena adanya beberapa faktor yang diantaranya adalah kentalnya sentiment kesukuan di berbagai Negara yang membuat mereka sulit untuk bersatu dalam satu kebangsaan, hal ini menyebabkan sulitnya lahir pemimpin Kurdi yang bias menyatukan bangsanya. Faktor geografis juga menghambat penyatuan suku Kurdi untuk mendirikan negara Kurdistan, telah

diketahui bahwa suku Kurdi terpecah menjadi beberapa bagian yaitu Turki, Irak, Iran, dan Suriah (Kompas, 7 November 2007).

KESIMPULAN DAN SARAN

Simpulan penelitian ini adalah sebagai berikut. *Pertama*, gerakan separatisme Kurdi di Turki untuk mendapatkan otonomi dimulai sejak 21 Maret 1984, yaitu pada saat dilarangnya perayaan *Nevros* (perayaan tahun baru suku Kurdi). *Kedua*, gerakan separatisme suku Kurdi di Turki dihimpun dalam PKK. Partai ini menjadi wadah aspirasi dan perjuangan suku Kurdi dalam memperjuangkan hak-hak untuk mempertahankan identitas, sistem budaya, dan otonomi daerah Kurdistan di Turki. *Ketiga*, kebijakan pemerintah Turki mengenai pengurangan sanksi negatif terhadap PKK dalam bidang sosial budaya, perekonomian, dan hukum belum dapat menyelesaikan konflik antara pemerintah dan etnis Kurdi.

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian yang diperoleh, dapat diajukan saran sebagai berikut. *Pertama*, bagi mahasiswa, peneliti mengharapkan mahasiswa sejarah hendaknya dapat melakukan penelitian secara lebih mendalam mengenai suku Kurdi baik dari perjuangannya dalam memperoleh daerah otonom Kurdistan dan juga upaya pemerintah negara penguasa Kurdi seperti Turki, Irak, Iran, dan Suriah yang masih sedikit. *Kedua*, bagi pemerintah Indonesia, diharapkan berhati-hati dalam mengatasi gerakan separatisme, dengan banyaknya suku bangsa di Indonesia maka sangat rentan timbulnya suatu konflik.

DAFTAR PUSTAKA

- Pour, Julius. (2008). *Ignatius Slamet Riyadi, Dari mengusir Kempeitai sampai menumpas RMS*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Riza Sihbudi, M. (1991). *Islam, Dunia Arab, Iran : Barat Timur Tengah*. Bandung : Mizan
- Sukarno. (1984). *Ilmu dan Perjuangan*. Jakarta: Inti Indayu Press
- Rubbin, Barry & Kemal Kirisci. (Ed). (2002). *Turkey in World Politics An Emerging Multiregional Power*. Istanbul: Bogazici University Press
- Toprak, Binnaz. (1999). *Islam Dan Perkembangan Politik Di Turki*. Yogyakarta: Tiara Wacana

Zurcher, Erik J. (2003). *Sejarah Modern Turki*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
Ully Nuzulian. (2009). "Sejarah Panjang Perjuangan Etnis Kurdi Di Turki". *Jurnal
Penelitian Universitas Tanjungpura, Edisi ekonomi dan sosial. Volume XV.
No. 3 Juli 2009.*

Kompas, 17 Juli 2005

Kompas, 20 Oktober 2007

Kompas, 7 November 2007

Kompas, 25 Februari 2008

Kompas, 26 Februari 2008

www.kapanlagi.com

<http://europe.eu.int/com/enlargement>

<http://www.pas.org/irp/world/>